WAKIL MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR WMH-KP.02.01-38

TENTANG
PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini kami mengundang dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah serta Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

A. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang akan diisi adalah:
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Eselon I.a)

B. Persyaratan
1. Menyampaikan lamaran kepada Panitia Seleksi;
2. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
3. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
5. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat:
   a. Pembina Utama Muda (IV/c) bagi PNS;
   b. Inspektur Jenderal Polisi bagi Anggota POLRI.
6. Sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau JF Jenjang Ahli Utama atau yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
7. Memiliki hasil evaluasi kinerja pegawai paling rendah dengan predikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan **(Lampiran I)**;

9. Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Tertinggi Lembaga Negara serta memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
10. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
11. Tidak dalam proses pemeriksaan dan/atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat instansi/Unit Kerja Bidang Aparat Pengawas Internal Pemerintah masing-masing yang diterbitkan oleh paling rendah setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara;
12. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
13. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak tahun 2024;
14. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) tahun 2024.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Pengumuman dan pendaftaran dimulai tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2025 melalui laman:
   1. asnkarier.bkn.go.id
   2. pansel.kemenkum.go.id
   3. kemenkum.go.id

B. Melakukan registrasi/ pendaftaran secara daring melalui laman:
   1. asnkarier.bkn.go.id dan
   2. pansel.kemenkum.go.id

C. Mengunggah dokumen kelengkapan pendaftaran berupa dokumen digital/ hasil *scan* yang secara keseluruhan terlihat dengan jelas dan dapat dibaca dalam bentuk PDF berukuran maksimum 2 Mb, yang terdiri atas:
   1. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermeterai **(format pada lampiran II)**;
   2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
   3. Kartu NPWP/Elektronik NPWP;
   4. Pasfoto terbaru berwarna dengan latar belakang merah;
   5. Ijazah (S1/D-IV, S2/S3) asli atau salinan yang dilegalisir;
   6. Keputusan pangkat terakhir;
   7. Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
   8. Dokumen Evaluasi Kinerja/Penilaian Kinerja 2 tahun terakhir;
   9. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani **(format pada lampiran III)**;
   10. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) Kepemimpinan terakhir/ Surat Keterangan sedang melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan (*jika ada*);
   11. Surat persetujuan/ rekomendasi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/ Pimpinan Tertinggi Lembaga Negara **(format pada lampiran IV)**;
   12. Pakta Integritas yang ditandatangani **(format pada lampiran V)**;
   13. Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat instansi/ Unit Kerja Bidang Aparat Pengawas Internal Pemerintah masing-masing;
   14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
   15. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah/ dokter pemerintah;
   16. Tanda bukti penyerahan laporan pajak (SPT) tahun 2024;
   17. Tanda bukti penyerahan LHKPN/LHKAN tahun 2024.

D. Pelamar wajib memiliki alamat email pribadi dan nomor telepon seluler yang masih aktif untuk dapat mengikuti proses seleksi. Pelamar dilarang menggunakan alamat email orang lain dalam proses pendaftaran;

E. Pendaftaran secara daring dan unggah berkas selambat-lambatnya tanggal 2 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB.

III. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman dan Pendaftaran Seleksi	18 September 2025 - 2 Oktober 2025
2.	Seleksi Administrasi	3 - 6 Oktober 2025
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	8 Oktober 2025
4.	Seleksi Kompetensi Bidang	9/ 10 Oktober 2025
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Bidang	Tentatif
6.	Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural	20 - 21 Oktober 2025
7.	Seleksi Wawancara	27 Oktober 2025
8.	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	31 Oktober 2025

Keterangan: Apabila *terdapat perubahan jadwal, dan akan diberitahukan melalui laman* pansel.kemenkum.go.id dan kemenkum.go.id

IV. KETENTUAN LAIN

A. Bagi Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

B. Kesalahan dan/atau kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Pelamar;

C. Pelamar wajib menjaga integritas selama proses berlangsung dan kepada pelamar untuk berhati-hati terhadap segala upaya penyalahgunaan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dalam proses seleksi ini;

D. Kepada para Pelamar dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panitia Seleksi ataupun berkomunikasi melalui telepon, komunikasi elektronik/surat menyurat maupun tatap muka berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka dengan Panitia Seleksi;

E. Kecurangan dalam bentuk apapun dianggap sebagai pelanggaran dan Tim Seleksi dapat menggugurkan keikutsertaan Pelamar;

F. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun;

G. Jadwal dan tahapan kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah, dan apabila terdapat perubahan jadwal pada setiap tahapan seleksi atau informasi lainnya akan diumumkan melalui laman pansel.kemenkum.go.id, kemenkum.go.id dan/atau asnkarier.bkn.go.id;

H. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka Ketua Tim Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan Pelamar;

I. Keputusan Tim Seleksi bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat;
J. Apabila terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran secara daring, harap menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi JPT Madya Kementerian Hukum melalui:
   1. alamat kantor: Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
   2. telegram: t.me/karirtalentakemenkum
   3. email sejati@kemenkum.go.id

   pada hari Senin s.d. Jumat, pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB.

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatianny a diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2025

Ketua Panitia Seleksi,

Edward Omar Sharif Hiariej

Lampiran I Pengumuman
Nomor : WMH-KP.02.01-38
Tanggal : 18 September 2025

STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Nama Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
Kelompok Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Urusan Pemerintah : Urusan Hukum

JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA	
I. IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	Menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian
II. STANDAR KOMPETENSI	

Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	5	Mampu menjadi *role model* dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional	5.1. Mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkup instansi yang dipimpinnya. 5.2. Menjadi *role model*/ keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional. 5.3. Membuat konsep kebijakan dan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma-norma yang sejalan dengan nilai strategis organisasi.
2. Kerjasama	5	Menciptakan situasi kerja sama secara konsisten, baik di dalam maupun di luar instansi	5.1. Menciptakan hubungan kerja yang konstruktif dengan menerapkan norma / etos / nilai-nilai kerja yang baik di dalam dan di luar organisasi. 5.2. Secara konsisten menjaga sinergi agar pemangku kepentingan dapat bekerja sama dengan orang di dalam maupun di luar organisasi. 5.3. Membangun konsensus untuk menggabungkan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan untuk tujuan bangsa dan negara.
3. Komunikasi	5	Menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja	5.1. Menghilangkan hambatan komunikasi, mampu berkomunikasi dalam isu-isu nasional yang memiliki risiko tinggi, menggalang hubungan dalam skala strategis di tingkat nasional. 5.2. Menggunakan saluran komunikasi formal dan non formal guna mencapai kesepakatan dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional. 5.3. Menggagas sistem komunikasi dengan melibatkan pemangku kepentingan sejak dini untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja di tingkat instansi/nasional

Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
4. Orientasi pada hasil	5	meningkatkan mutu pencapaian kerja organisasi	5.1. Memastikan kualitas sesuai standar dan keberlanjutan hasil kerja organisasi yang memberi kontribusi pada pencapaian target prioritas nasional. 5.2. Memastikan tersedianya sumber daya organisasi untuk menjamin tercapainya target prioritas instansi/nasional. 5.3. Membuat kebijakan untuk menerapkan metode kerja yang lebih efektif-efisien dalam mencapai tujuan prioritas nasional
5 Pelayanan Publik	5	Mampu memastikan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.	5.1. Mampu menciptakan kebijakan pelayanan publik yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik. 5.2. Menginternalisasikan nilai dan semangat pelayanan publik yang mengikuti standar objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan, tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok kepada setiap individu di lingkungan instansi/nasional. 5.3. Menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik.
6 Pengembangan diri dan orang lain	5	Menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian hasil	5.1. Menciptakan situasi yang mendorong individu, kelompok, unit kerja untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan di tingkat instansi. 5.2. Merekomendasikan/memberikan penghargaan bagi upaya pengembangan yang berhasil, memastikan dukungan bagi orang lain dalam mengembangkan kemampuan dalam unit kerja di tingkat instansi. 5.3. Memberikan inspirasi kepada individu atau kelompok untuk belajar secara berkelanjutan dalam penerapan di tingkat instansi.
7. Mengelola Perubahan	5	Memimpin, menggalang dan menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan pada tingkat instansi/nasional	5.1. Membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong perubahan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas nasional. 5.2. Menggalang dan menggerakkan dukungan para pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan. 5.3. Secara berkelanjutan, mencari cara cara baru untuk memberi nilai tambah bagi perubahan yang tengah dijalankan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan.
8. Pengambilan Keputusan	5	Menghasilkan solusi dan mengambil keputusan untuk Mengatasi permasalahan jangka	5.1 Menghasilkan solusi yang dapat mengatasi permasalahan jangka panjang.

Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
		panjang/strategis, berdampak nasional	5.2 Menghasilkan solusi strategis yang berdampak pada tataran instansi/nasional. 5.1 Membuat keputusan atau kebijakan yang berdampak nasional dengan memitigasi risiko yang mungkin timbul.
B Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	5	Wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis	5.1 Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri. 5.2 Mampu mengomunikasikan dampak risiko yang teridentifikasi dan merekomendasikan tindakan korektif berdasarkan pertimbangan perbedaan latar belakang agama/ kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik untuk membangun hubungan jangka Panjang. 5.3 Mampu membuat kebijakan yang mengakomodasi perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, gender, sosial ekonomi, preferensi politik yang berdampak positif secara nasional.
C. Teknis			
Generik			
10. Manajemen Pengawasan Intern	5	Memberikan masukan kepada pimpinan organisasi APIP, menjadi katalisator perubahan dan mengevaluasi perencanaan pengawasan intern tahunan berbasis risiko yang sesuai dengan standar	5.1. Mendukung fungsi dan menanamkan nilai audit intern dalam organisasi. 5.2. Mampu mengevaluasi perencanaan pengawasan intern berbasis risiko sesuai standar dan strategi organisasi APIP. 5.3. Mampu merumuskan kompetensi kolektif yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis APIP.
Spesifik			
11. Manajemen Risiko	5	Meyakinkan penerapan Manajemen Risiko dalam melakukan Analisis Tata Kelola risiko, dan Pengendalian organisasi dalam kegiatan audit, kesesuaian metodologi audit intern dengan Tata Kelola dan Pengendalian, dan mengevaluasi Tata Kelola dan Pengendalian organisasi,	5.1 Mampu mengembangkan kebijakan Manajemen Risiko dalam kesesuaian kerangka tata kelola, risiko, dan pengendalian yang dimiliki. 5.2 Mampu mengembangkan kebijakan Manajemen Risiko dalam identifikasi titik kritis Analisis Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian dalam penugasan audit intern. 5.3 Mampu mengembangkan konsep Manajemen Risiko dalam pemahaman atas proses-proses yang digunakan untuk mendukung investigasi atas penipuan (fraud).

Kompetensi	Level	Deskripsi	Indikator Kompetensi
		memberikan pandangan yang komprehensif mengenai profil risiko organisasi saat ini dan perkembangannya	
12. Penyusunan Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi	5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam Penyusunan Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep,kebijakan dalam Penyusunan Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi; 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan dalam Penyusunan Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan; dan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam Penyusunan Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi.
13. Penerapan Standar Audit	5	Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan audit intern dan meyakinkan kegiatan audit intern tersebut sesuai dengan kebijakan organisasi dan standar audit serta mengembangkan dan memelihara QAIP	5.1 Mampu mengembangkan kebijakan penerapan standar audit dalam penugasan audit intern. 5.2 Memimpin implementasi Standar Audit Intern pada APIP. 5.3 Mampu mengembangkan kebijakan pendekatan berbasis risiko dalam penyusunan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) sesuai Standar Audit Intern, serta melakukan penyesuaian apabila dibutuhkan.

Lampiran II Pengumuman
Nomor : WMH-KP.02.01-38
Tanggal : 18 September 2025

(FORMAT SURAT LAMARAN)

Yth. Ketua Panitia Seleksi Terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Kementerian Hukum
di Jakarta

……., ….. September 2025

Sehubungan dengan Pengumuman Nomor..... Tanggal …..tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:
NIP/NRP	:
Tempat/Tanggal Lahir	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Jabatan	:
Kementerian/Lembaga/Instansi	:
No Handphone	:
Email	:

mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum untuk jabatan Inspektur Jenderal.

Saya bersedia mengikuti seluruh rangkaian/tahapan seleksi sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi. Sebagai kelengkapan pendaftaran, bersama ini disampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Meterai/e-Meterai
Rp 10.000,-
Tanda tangan

Nama Lengkap
NIP/NRP

Lampiran III Pengumuman
Nomor : WMH-KP.02.01-38
Tanggal : 18 September 2025

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

FOTO BERWARNA UKURAN 4 X 6 LATAR MERAH

IDENTITAS DIRI

1. Nama Lengkap (dengan gelar) : _____
2. Tempat, Tanggal Lahir : _____
3. Jenis Kelamin : _____
4. Alamat : _____
5. Telepon/HP : _____
6. Alamat email : _____
7. NIP/NRP : _____
8. Jabatan saat ini : _____
9. Eselon & Gol. Ruang : _____
10. Unit Kerja : _____

LINGKUNGAN KELUARGA

Susunan Keluarga (Pasangan dan Anak)

	Nama	L/P	Tempat/Tgl Lahir	Pendidikan	Pekerjaan
Pasangan					
Anak 1					
Anak 2					
dst ...					

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Jurusan	Tempat	Thn s.d. Thn	Keterangan
S3					

S2					
S1 / D4					
SMA					
dst ...					

2. Pendidikan Informal (Kursus atau *Training*)

No.	Jenis Kursus/*Training*	Tempat	Tahun	Keterangan
1.				
2.				
3.				
dst ...				

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Uraikan dengan singkat pekerjaan Saudara selama ini (3 jabatan terakhir):

No.	Jabatan	Bln/Thn s/d Bln/Thn	Unit Kerja
1.			
2.			
3.			
dst ...			

2. Deskripsikan tugas dalam 3 (tiga) jabatan terakhir tersebut di atas secara konkret.

_____

_____

DATA PEKERJAAN

1. Berapa orang bawahan langsung Saudara di jabatan sekarang?
   Di bagian apa dan sebagai apa mereka bekerja? . . . . . orang.

No.	Nama	Bagian	Peran/jabatan

2. Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai posisi jabatan Saudara di dalam struktur organisasi, tolong gambarkan di bawah ini struktur organisasi tempat Saudara bekerja, dan **beri tanda bintang (*) di mana posisi jabatan Saudara**.

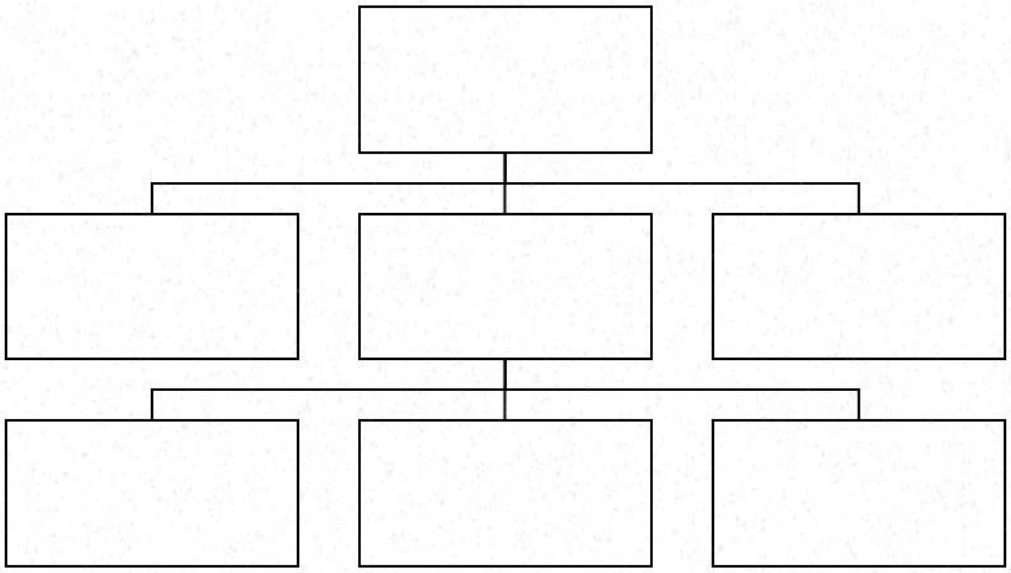

3. Apa saja tanggung jawab Saudara pada pekerjaan/jabatan Saudara sekarang?

_____
_____
_____
_____

4. Berikan gambaran secara terperinci apa saja yang Saudara lakukan selama ini dalam rangka menyelesaikan setiap tanggung jawab Saudara dalam pekerjaan!

_____
_____

_____
_____
_____

5. Ceritakan pengalaman keterlibatan Saudara dalam Proyek Kerja/Kegiatan Tim selama kurun waktu **2 (dua) tahun terakhir** dan jelaskan peran/tanggung jawab Saudara dalam Proyek Kerja/Kegiatan Tim tersebut!

No.	Proyek Kerja/ Kegiatan Tim	Bln/ Thn s.d. Bln/ Thn	Peran/ Jabatan
a.			
b.			
dst ...			

KONDISI KERJA

6. Ceritakan kondisi lingkungan kerja Saudara saat ini (ruangan, fasilitas kerja, SDM yang terlibat).

_____
_____
_____
_____

7. Ada beberapa aspek/situasi/kondisi yang membuat Saudara dapat optimal dalam bekerja. Jelaskan aspek apa saja yang dapat mendukung optimalisasi Saudara dalam bekerja

_____
_____
_____
_____

……., …. September 2025

(……..)

Lampiran IV Pengumuman
Nomor : WMH-KP.02.01-38
Tanggal : 18 September 2025

(FORMAT SURAT PERSETUJUAN/ REKOMENDASI)

(KOP SURAT INSTANSI)

SURAT PERSETUJUAN/REKOMENDASI DARI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN/PIMPINAN TERTINGGI LEMBAGA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Kementerian/Lembaga/Instansi :

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian/Pimpinan Tertinggi Lembaga dari:
Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Kementerian/Lembaga/Instansi :

menyatakan persetujuan untuk yang bersangkutan mengikuti kegiatan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum untuk jabatan Inspektur Jenderal dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan sebagai berikut:

1. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan dilamar paling singkat 7 (tujuh) tahun; dan
2. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.

……, …..September 2025
Nama Jabatan,

Meterai/e-Meterai
Rp 10.000,-
Tanda tangan dan cap dinas

Nama Lengkap
NIP/NRP

Lampiran V Pengumuman
Nomor : WMH-KP.02.01-38
Tanggal : 18 September 2025

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum untuk jabatan Inspektur Jenderal dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. menjunjung tinggi integritas, netralitas, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan;
2. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan
5. tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025, yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., September 2025
Hormat saya,

Meterai/e-Meterai
Rp 10.000,-
Tanda tangan

Nama Lengkap
NIP/NRP